

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sistematika .....	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2017 dalam Capaian Renstra RKPD	4
2.1.a Evaluasi Pelaksanaan .....	5
2.1.b Analisa Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 .....	5
2.1.c Analisa Akuntabilitas Keuangan .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RKPD .....	6
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RKPD .....	6
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	8
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	
3.2.1 Tujuan .....	8
3.2.2 Sasaran .....	8
3.2.3 Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2019.....	8
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
4.1 Rencana Kerja .....	11
BAB IV PENUTUP .....	13
TABEL	
Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RKPD dan Pencapaian Renstra RKPD s/d Tahun 2017
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan RKPD BPKAD dalam tahun 2017
Tabel 2.3	: Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Tabel 2.4	: Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan Tahun 2019

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang oleh organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing OPD Tahun 2019 yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah juga memiliki kewajiban menyusun rencana kerja daerah.

Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta merupakan rencana kerja selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2019;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016. Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta adalah untuk memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan kegiatan dan sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi dan misi OPD

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renja ( BPKAD ) Kota Yogyakarta adalah :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat
- 2) Meningkatkan pendapatan pajak daerah

### **1.4. Sistematika**

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD adalah menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD dan susunan garis besar isi dokumen adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN LALU ( TAHUN 2017 ) DAN CAPAIAN RENSTRA

PERANGKAT DAERAH

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANAGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah yang tugasannya dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan pajak daerah yang mempunyai beberapa program antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
  - c. Kegiatan Penyedia Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
  - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
- 5) Program Pengelolaan Anggaran Daerah
  - a. Kegiatan Perencanaan Anggaran
  - b. Kegiatan Pengendalian Anggaran
- 6) Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan
  - a. Kegiatan Pengendalian Belanja Daerah
  - b. Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
- 7) Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - a. Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - b. Kegiatan Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
- 8) Program Pelayanan , Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
  - a. Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah
  - b. Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
  - c. Kegiatan Penetapan Pajak Daerah
- 9) Program Pembukuan dan Penagihan
  - a. Kegiatan Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah
  - b. Kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
- 10) Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset
  - a. Kegiatan Perencanaan ,Pengadaan dan Distribusi Aset

- b. Kegiatan Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset
- c. Kegiatan Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan

#### **2.1.a. Evaluasi kegiatan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan :

1. Dilaksanakan koordinasi intern, monitoring dan evaluasi setiap sebulan.
2. Melaksanakan ketugasan dengan maksimal.
3. Meningkatkan pelayanan pajak daerah.

#### **2.1. b. Analisa Akuntabilitas Kinerja tahun 2017**

Analisa akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Yogyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan sebagai SKPD pengelola keuangan dan aset daerah serta sebagai penghasil melalui pendapatan pajak daerah yang merupakan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah . Dalam pencapaian kinerja kebijakan dari BPKAD Kota Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat kedalam yaitu mendukung tugas pokok dan fungsi berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dibidang pengelolaan keuangan dan aset dengan capaian kinerja 98,55% diatas targetnya 89,37% dan dengan meningkatkan pendapatan pajak daerah sebagai kontribusi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 64,84% target 59% sehingga capaian diatas target.
2. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil.

#### **2.1.c. Analisa Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp20.616.215.710** terealisasi **Rp18.866.808.500** atau **91,51%**.

Pencapaian realisasi cukup tinggi dikarenakan Belanja Tidak langsung meliputi Belanja Gaji PNSD yang merupakan belanja wajib dan mengikat serta konsekuensi terhadap pencapaian target pendapatan pajak daerah.

Anggaran Belanja langsung sebesar **Rp33.917.014.011** terealisasi **Rp31.139.718.598,44** atau **91,81%**.

Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output kegiatan sesuai yang ditargetkan dan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala yang direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2017 yang dituangkan dalam Tabel 2.1.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berisi kajian capaian kinerja pelayanan SKPD terdapat dengan indikator :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kedua indikator tersebut dituangkan dalam Tabel 2.2.

## **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD**

1. Perlunya peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
2. Perlunya penerapan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan wajib pajak sekaligus pengawasan dan pembinaannya.
3. Perlunya peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
5. Perlunya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga perlu adanya kompetisi antar kabupaten /kota dalam peningkatan pajak daerah.
6. Perlunya peningkatan penataan aset daerah.

## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Melalui Program yang disusun

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
  - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Kegiatan Bimbingan Tehnis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja
5. Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
  - a. Kegiatan Perencanaan Anggaran
  - b. Kegiatan Pengendalian Anggaran

6. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer
  - a. Kegiatan Pengendalian Belanja Daerah
  - b. Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
7. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - a. Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - b. Kegiatan Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
8. Program Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
  - a. Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah
  - b. Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
  - c. Kegiatan Penetapan Pajak Daerah
9. Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah
  - a. Kegiatan Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah
  - b. Kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
10. Program Perencanaan , Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset
  - a. Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi ASet
  - b. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset
  - c. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.1.a. Optimalisasi sarana dan prasarana Sumber Daya Manusia**

Beberapa kebijakan Nasional dalam mengimplementasikan di daerah perlu dukungan dan ketepatan terhadap prioritas sasaran, termasuk Sumber Daya Manusia/tenaga yang semakin berkurang dikarenakan banyak yang purna tugas dan tidak diimbangi dengan rekrutmen pegawai. Berdasarkan anjab kebutuhan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebanyak 294 orang ternyata baru terpenuhi 114 orang atau 39% (tiga puluh sembilan persen)

Sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur ketugasan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta perlu pemenuhan SDM serta Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan produktifikasi kerja, sumber daya aparat pemerintahan sangatlah penting dan berpengaruh dalam pencapaian kinerja.

3.1.b. Pengaturan penyelenggaraan fungsi manajemen dan aparat secara profesional, sesuai dengan ketugasan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta harus melakukan pengelolaan keuangan yang efektif, rasional sesuai kebutuhan anggaran yang diperlukan, transparan dan akuntabel serta dalam pengelolaan aset daerah.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **3.2.1. Tujuan**

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Rumusan tujuan perangkat dapat dihitung dengan formula indikator Perangkat daerah yang diukur dengan prosentase.

##### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset meningkat
2. Pendapatan pajak daerah meningkat

##### **3.2.3. Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2019**

A. BPKAD Kota Yogyakarta mengampu 10 (sepuluh) Program yang terdiri dari 4(empat) Program Internal dan 6(enam) Program eksternal ada 21 (dua puluh satu) terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
  - a. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
  - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Kegiatan Bimbingan Tehnis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja
5. Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
  - a. Kegiatan Perencanaan Anggaran
  - b. Kegiatan Pengendalian Anggaran
6. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer
  - a. Kegiatan Pengendalian Belanja Daerah
  - b. Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
7. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - a. Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - b. Kegiatan Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
8. Program Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
  - a. Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah
  - b. Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
  - c. Kegiatan Penetapan Pajak Daerah
9. Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah
  - a. Kegiatan Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah
  - b. Kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
10. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset
  - a. Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi ASet
  - b. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset
  - c. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan

B. Lokasi Program dan Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

BPKAD Kota Yogyakarta tidak mengampu inspirasi atau usulan secara langsung dengan masyarakat dengan melalui musrenbang.

C. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai anggaran kinerja dan usulannya dari masing-masing kegiatan masih dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan, dan ada beberapa pengalihan output di SKPD lain karena tidak sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan pencapaian Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada Misi ke 7 (tujuh) yakni : "**Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih**"

Sesuai dengan tupoksi OPD yaitu mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang merupakan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta harus senantiasa melakukan perbaikan dalam penentuan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang efektif, efisien dan rasional serta akuntabilitas untuk kepentingan pemerintah daerah, sehingga upaya dapat dilakukan adalah :

- Harus dapat menyajikan Laporan Keuangan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan
- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meraih penilaian dari hasil audit BPK dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian
- Meningkatkan kualitas SDM untuk penataan sistem prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kinerja para pejabat dalam mengamanahi kegiatan yang dilaksanakan sesuai program dan tatakala

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 terdapat pada Tabel 3.1. (terlampir).

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1. Rencana Kerja**

Usulan Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta telah dituangkan dalam tabel 4.1 atau yang lebih dikenal 3.1.

Dari masing-masing program sesuai indikator per program dan output per kegiatan dengan kebutuhan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta telah dirasionalkan sesuai kebutuhan.

Sehingga dapat memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tatakata dan target yang telah ditetapkan sebelum tahun berjalan dan merupakan suatu perencanaan.

No	Program / Kegiatan	Usulan Anggaran	Keterangan
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		
	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 289.980.000	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Rp 7.082.100.590	
	Penyediaan Jasa Pengelolab Pelayanan Perkantoran	Rp 134.466.188	
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Aparatur</b>		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 148.133.341	
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp 344.758.850	
3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		
	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rp 50.000.000	
4.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Rp 14.413.000	
5.	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran</b>		
.	Perencanaan Anggaran	Rp 146.144.230	
	Pengendalian Anggaran	Rp 26.143.980	

No	Program / Kegiatan	Usulan Anggaran	Keterangan
6.	<b>Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer</b>		
	Pengelolaan Belanja Daerah	Rp 93.618.867	
	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Rp 33.711.200	
7.	<b>Program Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>		
	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 398.921.417	
	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Rp 224.438.000	
8.	<b>Program Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah</b>		
	Pelayanan Pajak Daerah	Rp 303.497.475	
	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Rp 144.160.000	
	Penetapan Pajak Daerah	Rp 360.797.000	
9.	<b>Program Pembukuan dan Penagihan</b>		
	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	Rp 330.035.000	
	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	Rp 1.898.676.000	
10.	<b>Program Perencanaan, Pemanfaatan dan inventarisasi Aset</b>		
	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	Rp 1.789.613.700	
	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	Rp 2.527.322.800	
	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	Rp 296.517.650	

Usulan anggaran tidak melebihi pagu yang telah ditentukan yakni besarnya pagu Rp 16.664.010.238,- usulan sebesar Rp 16.637.449.288,- dari usulan tersebut ada beberapa output yang dialihkan ke SKPD lain karena tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kota Yogyakarta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

#### A. Kebutuhan anggaran

Kebutuhan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang efisien, efektif transparan akuntabel dan rasional.

Apabila ada kebijakan maka tambahan anggaran akan menyesuaikan.

#### B. Kaidah Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### C. Rencana lanjutan

Rencana selanjutnya akan melaksanakan sesuai dengan RPJMD dari Tahun 2017 sampai 2022.

Pengusulan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2019 yang ada dalam Pagu Indikatif tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 ada kenaikan anggaran sebesar 3%(tiga prosen) dari anggaran usulan di Tahun 2019. Total Anggaran Badan Pengelolaan Keuangannn Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dengan jumlah anggaran yang diusulkan sebesar Rp 16.637.449.288 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah ) untuk mencapai program yang ada sesuai dengan fungsi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga pelaksanaan sesuai tatakala yang sudah direncanakan dan anggaran yang diusulkan telah dirasionalkan sesuai kebutuhan. Dengan demikian kebutuhan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan dan telah dirasional.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun ini selain merupakan jabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keaungan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Yogyakarta,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kota Yogyakarta,

Drs. Kadri Renggono, M.Si.  
NIP. 19661127 199303 1 006